

# RENJA PERUBAHAN 2022

*Dinas Tenaga Kerja*

*Kabupaten Tanjung Jabung Barat*



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS TENAGA KERJA**

*Jln. Kapten Pierre Tendean Tlp/Fax 0742-21575*  
*Kuala Tungkal*

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Renja Perubahan ini mengacu pada Renja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, yang mana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 adalah merupakan salah satu unsur teknis Penunjang Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat maka diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk Otonomi Daerah dapat mempunyai keleluasan dan kesempatan serta kemandirian dalam menggali segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Renja Perubahannya.

Kuala Tungkal,

2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**DIANDA PUTRA, S.STP., M.S**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780626 199612 1 001

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II       EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022</b> .....	<b>5</b>
2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DINAS TENAGA KERJA Tahun 2022 .....	5
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II .....	11
2.3 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
<b>BAB III       RENJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>20</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Tenaga Kerja.....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	22
<b>BAB IV       PENUTUP</b> .....	<b>31</b>

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi JPD, JMD serta Tata cara Perubahan JPD, JMD dan RKPD Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat upaya penyempurnaan Sistem Perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahap pelaksanaan musyawarah Perencanaan di Tingkat Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, Menteri Dalam Negeri telah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan secara bertahap dan fokus.

Peraturan tersebut di atas telah membawa perubahan di dalam Penyusunan Perencanaan Nasional dan Daerah. Dahulu dikenal adanya pertemuan acara Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), yang merupakan salah satu forum dalam merencanakan berbagai usulan program/kegiatan. Saat ini telah berubah menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), sebagai acuan dalam penyusunan target kinerja dari berbagai Dinas/Instansi yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusunlah Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan beedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang belum terakomodir serta dengan tetap memperhatikan hasil Rapat Forum OPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun menggunakan pendekatan Management Strategy (Strategi Manajemen) yang mengacu pada aturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Normatif yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara RI tahun 1956 No. 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara RI tahun 1965 No. 50, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3903 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 81, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3969 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab dengan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi JPD, JMD serta Tatacara Perubahan JPD, JMD dan RKPd;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;
  16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62 );
  17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja ( Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
  18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Sstrategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Dengan kata lain juga dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) yang memuat prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan memperhatikan isu-isu strategis terhadap perkembangan dunia ketenagakerjaan agar tetap relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

#### 1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman arah pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu satu tahun, sesuai Visi Misi dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024. Sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

#### DAFTAR ISI

#### Kata Pengantar

#### Daftar Isi

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

#### BAB II EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DINAS TENAGA KERJA Tahun 2022
- 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

#### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

- 3.1 Telaah Terhadap Kajian Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DINAS TENAGA KERJA Tahun 2022**

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E 75. Dari Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja Dinas Tenaga Kerja periode renja dan RKA tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Formulir E. 75  
Periode Renja dan RKA Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu DPA 2022	Pagu Renja 2022	Sumber Dana	Perubahan		Pagu sesudah Perubahan
				Sebelum	Sesudah				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					Rp 5.235.162.127	Rp 9.874.089.236	APBD II	Rp 1.994.537.692	Rp 998.612.949	Rp 6.231.086.870
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 4.731.287.399	Rp 6.294.533.236	APBD II	Rp 1.114.955.550	Rp 949.792.949	Rp 4.896.450.000
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp73.450.000	Rp148.720.000	APBD II	Rp14.200.000	Rp-	Rp87.650.000
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	4 Laporan	Rp73.450.000	Rp98.720.000	APBD II	Rp14.200.000	Rp-	Rp87.650.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Tenaga Kerja			Rp3.786.324.565	Rp3.059.773.000	APBD II	Rp-	Rp947.992.949	Rp2.838.331.616
2.07.01.2.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	20 Orang	Rp3.655.764.565	Rp2.934.773.000	APBD II	Rp-	Rp947.992.949	Rp2.707.771.616
2.07.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Dokumen	Rp130.560.000	Rp125.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp130.560.000
2.07.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 Bulan		Rp20.400.000	Rp272.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp20.400.000
2.07.01.2.0.5.02	Pengadaan Pakaian	Jumlah Paket Pakaian	Dinas Tenaga	51 stel	51 Paket	Rp20.400.000	Rp122.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp20.400.000

5	Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kerja								
2.07.01.2.0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Rp462.532.834</b>	<b>Rp612.281.036</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp58.455.550</b>	<b>Rp800.000</b>	<b>Rp520.188.384</b>
2.07.01.2.0 01 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Paket	Rp4.596.176	Rp14.742.882	<b>APBD II</b>	Rp-	Rp-	Rp4.596.176
2.07.01.2.0 02 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Paket	Rp73.132.772	Rp65.161.639	APBD II	Rp-	Rp-	Rp73.132.772
2.07.01.2.0 04 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	557 Paket	Rp13.590.000	Rp27.400.000	APBD II	Rp-	<b>Rp-</b>	Rp13.590.000
2.07.01.2.0 05 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	15.129 Paket	Rp13.561.136	Rp34.870.515	APBD II	Rp1.800.000	Rp-	Rp15.361.136
2.07.01.2.0 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	1.080 Dokumen	Rp4.320.000	Rp8.400.000	<b>APBD II</b>	Rp-	Rp800.000	Rp3.520.000
2.07.01.2.0 09 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	312 paket	312 Laporan	Rp353.332.750	Rp453.306.000	APBD II	Rp56.655.550	Rp-	Rp409.988.300
2.07.01.2.0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>0 Unit</b>	<b>46 Unit</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.629.101.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp 1.042.300.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.042.300.000</b>
2.07.01.2.0 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	1 Unit	Rp -	Rp 471.615.000	APBD II	Rp418.800.000	Rp-	Rp418.800.000
2.07.01.2.0 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	8 Unit	Rp -	Rp 989.486.000	APBD II	Rp470.500.000	Rp-	Rp470.500.000
2.07.01.2.0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	9 Unit	Rp -	Rp 168.000.000	APBD II	Rp135.000.000	Rp-	Rp135.000.000
2.07.01.2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	15 Unit	Rp -	Rp -	APBD II	Rp18.000.000	Rp-	Rp18.000.000

Disediakan											
2.07.01.2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>224 Laporan</b>	<b>224 Laporan</b>	<b>Rp249.800.000</b>	<b>Rp252.200.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp248.800.000</b>
2.07.01.2.0 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja	200 Laporan	200 Laporan	Rp2.000.000	Rp5.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp2.000.000
2.07.01.2.0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	12 Laporan	Rp91.800.000	Rp91.200.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp91.800.000
2.07.01.2.0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	12 Laporan	Rp156.000.000	Rp156.000.000	APBD II	Rp-	Rp1.000.000	Rp155.000.000
2.07.01 2.0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>30 Unit</b>	<b>31 Unit</b>	<b>Rp138.780.000</b>	<b>Rp320.458.200</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp138.780.000</b>
2.07.01 2.0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Tenaga Kerja	13 unit	13 Unit	Rp90.465.000	Rp133.898.200	APBD II	Rp-	Rp-	Rp90.465.000
2.07.01 2.0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	1 Unit	Rp37.435.000	Rp51.970.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp37.435.000
2.07.01 2.0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Tenaga Kerja	16 unit	16 Unit	Rp10.880.000	Rp84.590.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp10.880.000
2.07.01 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Tenaga Kerja	0	1 Unit	Rp-	Rp 50.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp-
2:07:03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>					<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.642.500.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp 433.180.677</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp 433.180.677</b>
2.7.3.201	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>					<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.138.500.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp 433.180.677</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 433.180.677</b>

2.7.3.201.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022	Desa Suak Labu Kec Kuala Betara, Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, Kel. Tungkal V Kec. Seberang Kota, Desa Sri Agung Kec. Batang Asam	0	46 Orang	Rp -	Rp 1.138.500.000	APBD II	Rp317.617.201	Rp-	Rp317.617.201
2.7.3.201.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	13 Unit	Rp -	Rp -	APBD II	Rp115.563.476	Rp-	Rp115.563.476
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>					<b>Rp292.598.161</b>	<b>Rp1.185.000.000</b>	APBD II	<b>Rp313.356.373</b>	<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp593.954.534</b>
<b>2.07.04 2.0 1</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>	<b>350 Orang</b>	<b>350 Orang</b>	<b>Rp120.980.000</b>	<b>Rp925.000.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp282.102.964</b>	<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp391.082.964</b>
2.07.04 2.0 01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Tanjung Jabung Barat	0 Orang	0 Orang	Rp120.980.000	Rp155.000.000	APBD II		Rp12.000.000	Rp108.980.000
2.07.04 2.0 01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Tanjung Jabung Barat	350 Orang	350 Orang	Rp -	Rp -	APBD II	Rp40.000.000	Rp-	Rp40.000.000
2.7.4.201.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Desa Bukit Bakar, Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh, Desa Rantau Badak Kec. Muara Papalik	0	60 Orang	Rp -	Rp 695.000.000	APBD II	Rp242.102.964	Rp-	Rp242.102.964
2.07.04 2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal</b>	<b>1000 orang</b>	<b>1000 orang</b>	<b>Rp171.618.161</b>	<b>Rp165.000.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp31.253.409</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp202.871.570</b>
2.07.04 2.0 02 3	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal	1000 orang	1000 orang	Rp171.618.161	Rp165.000.000	APBD II	Rp 31.253.409	Rp-	Rp202.871.570
<b>2.07 05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					<b>Rp211.276.567</b>	<b>Rp543.056.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp133.045.092</b>	<b>Rp36.820.000</b>	<b>Rp307.501.659</b>
<b>2.07 05 2.0 1</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1</b>		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>			<b>Rp137.526.567</b>	<b>Rp238.750.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp55.603.785</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp193.130.352</b>

	<b>(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										
2.07 05 2.0 01 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Perusahaan	15 Perusahaan	Rp39.858.280	Rp40.000.000	APBD II	Rp23.029.625	Rp-	Rp62.887.905
2.07 05 2.0 02 1	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Perusahaan	15 Perusahaan	Rp34.658.287	Rp35.000.000	APBD II	Rp32.574.160	Rp-	Rp67.232.447
2.07 05 2.0 03 1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Perusahaan/200 Orang	10 Perusahaan/200 Orang	Rp63.010.000	Rp163.750.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp63.010.000
2.07 05 2.0 2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>			<b>Rp73.750.000</b>	<b>Rp304.306.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp77.441.307</b>	<b>Rp36.820.000</b>	<b>Rp114.371.307</b>
2.07 05 2.0 02 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Tanjung Jabung Barat	18 Perkara		Rp73.750.000	Rp110.800.000	APBD II	Rp-	Rp36.820.000	Rp36.930.000
2.07 05 2.0 02 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	15 SP/SB	Rp-	Rp35.000.000	APBD II	Rp45.381.307	Rp-	Rp45.381.307
2.07 05 2.0 02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	1 LKS Tripartit	Rp-	Rp91.990.000	APBD II	Rp32.060.000	Rp-	Rp32.060.000

## 2.2 Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2022 merupakan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan II, dengan mengacu pada Pengendalian dan Evaluasi Renja Disnaker tahun 2022. Dari tabel Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2022 diatas, terlihat bahwa ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti Pelatihan. Baik itu Pelatihan Berbasis Kompetensi maupun Pelatihan Berbasis Masyarakat, dan Kegiatan dalam Program Hubungan Industrial. Untuk itu pada Perubahan APBDP Tahun 2022 ini diharapkan bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana tersebut.

Dari Kegiatan yang dilaksanakan pada APBD Tahun 2022 ini, pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan menggunakan Formulir E 81. Adapun hasil dari pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2022, Capaian rata-rata serapan keuangan sebesar 29,45%. Angka rata-rata capaian kinerja bukan berarti terkendala pada teknis kegiatan, tetapi indikator keluaran kegiatan yang tidak bisa di rinci tiap triwulan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II (Bulan April-Juni) Tahun 2022 dan capaian Renstra dijabarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

FORMULIR E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah  
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Triwulan II (April s/d Juni Tahun 2022)

No	Sasaran	Ususi/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
				K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)	K	. (000)					
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100				14 = 6 + 12		15 = 14/5*100
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>						4.731.287.399							1.760.502.812											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	73.450.000	20.200.000	3	39.250.000			3	39.250.000	75	53,44								
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	24	Laporan	542.312.500	4	56.792.500	4	73.450.000	2	20.200.000	3	39.250.000			3	39.250.000	75	53	6	20.200.000	25,00	3,72	Dinas ker	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								462.532.834					244.816.597			52	52,93							
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu terucupinya Penerangan Kantor	60	Bulan	77.322.421	12	4.647.000	12	4.596.176	3	1.241.275	6	2.226.575			6	2.226.575	50	48	15	1.241.275	25,00	1,61	Dinas ker	
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	Bulan	384.137.034	12	64.419.603	12	73.132.772	3	13.321.450	6	31.805.389			6	31.805.389	50	43	15	13.321.450	25,00	3,47	Dinas ker	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik makan minum kantor	60	Bulan	159.400.000	12	16.800.000	490	13.590.000		2.400.000	176	5.200.000			176	5.200.000	36	38	15	2.400.000	25,00	1,51	Dinas ker	
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan pengadaan yang dibeli / digandakan	60	Bulan	193.812.987	12	25.249.184	15129	13.561.136		600.000	8160	2.635.000			8160	2.635.000	54	19	8172	600.000	13.620,00	0,31	Dinas ker	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Bulan	40.600.000	12	3.360.000	1080	4.320.000		560.000	18	1.400.000			18	1.400.000	2	32	30	560.000	50,00	1,38	Dinas ker	
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang akan dilaksanakan	60	Bulan	2.602.216.000	12	332.585.790	312	353.332.750		85.354.793	374	201.549.633			374	201.549.633	120	57	386	85.354.793	643,33	3,28	Dinas ker	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							249.800.000						111.514.269			53	45							
8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikabla	60	Bulan	27.025.000	12	3.000.000	200	2.000.000	3	400.000	960	1.200.000			120	1.200.000	60	60	132	400.000	220,00	1,48	Dinas ker	
9		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah hitungan beban telepon/air/listrik yang telaki, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	60	Bulan	511.200.000	12	64.954.157	12	91.800.000	6	17.579.459			33.314.269			6	33.314.269	50	36	18	17.579.459	30,00	3,44	Dinas ker
10		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu/bulan jasa layanan umum kantor	60	Bulan	862.000.000	12	156.000.000		156.000.000		38.000.000			77.000.000			6	77.000.000	50	49	18	38.000.000	30,00	4,41	Dinas ker





### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Rancangan Renstra 2021-2026, dan Visi Misi serta Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024, pada APBD Perubahan Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan penambahan Anggaran sebesar . **2.472.185.417** (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), dan Pergeseran Anggaran dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar . 947.992.949 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Tabel : T-C.30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

## Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama : Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator	2021			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	OPD
		Target	Realisasi	Rasio Capaian							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
1	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-			1 dokumen Makro	15 dokumen Mikro	15 dokumen Mikro	15 dokumen Mikro	15 dokumen Mikro	1 dokumen makro / 60 dokumen mikro	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase tenaga kerja yang lulus pelatihan bersertifikat kompetensi	74%	89%	100%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Tenaga Kerja
4	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja	342 orang	350 orang	100%	350 orang	400 orang	410 orang	420 orang	430 orang	430 orang	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	72%	91%	100%	78%	84%	90%	96%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun;	20 Kasus	25 kasus	100%	20 Kasus	18Kasus	16Kasus	14Kasus	13Kasus	101 Kasus	Dinas Tenaga Kerja

7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);	10 Kasus	6 kasus	60%	10Kasus	9 Kasus	8Kasus	7 Kasus	7Kasus	51 Kasus	Dinas Tenaga Kerja
8	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (BPJS);	200 orang	200 orang	100%	200 orang	6.136 orang	Dinas Tenaga Kerja				
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah;	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	10 Orang	128 Orang	100%	80 Orang	410 Orang	Dinas Tenaga Kerja				
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja
12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan;	-	121 Orang	100%	40 Orang	200 Orang	Dinas Tenaga Kerja				
13	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	17 Sub Kegiatan	-	-	17 Sub Kegiatan	100%	Dinas Tenaga Kerja				
14	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	10 Orang	71 orang	100%	80 Orang	410 Orang	Dinas Tenaga Kerja				
	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60 orang	71 orang	100%							Dinas Tenaga Kerja

15	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%	10 Perusahaan	70 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja				
16	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	345 orang	350 orang	100%	350 orang	400 orang	410 orang	420 orang	430 orang	2.355 Orang	Dinas Tenaga Kerja

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada kebijakan Nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA**

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Faktor – faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadikan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan melihat Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Tenaga Kerja melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

#### **VISI**

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH  
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Kabupaten Tanjung jabung Barat menetapkan misi-misi apa saja yang harus dilaksanakan. Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada Misi III dan Misi IV, yaitu :

#### **MISI III**

**Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik**

#### **MISI IV**

**Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam upaya mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, membuat skema dalam pencapaiannya seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</b>			
<b>MISI III : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik</b>			
<b>MISI IV : Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Terselenggara Tata Kelola Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	1. Penyusunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pelayanan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja  2. Meningkatnya pembinaan hubungan industrial	1. Meningkatkan Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja  2. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1. Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro 2. Memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja dan potensi lokal serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelatihan 3. Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas 4. Memberikan pelatihan berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal dan produk unggulan daerah 5. Memberikan perlindungan tenaga kerja untuk hubungan industrial yang harmonis

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana program, kegiatan Indikator Kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju Visi dan Misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi  
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

3. Program Penempatan Tenaga Kerja
  - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja  
Perluasan Kesempatan Kerja
  - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
4. Program Hubungan Industrial
  - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan  
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"  
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi  
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menunjang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu DPA 2022	Pagu Renja 2022	Sumber Dana	Perubahan		Pagu sesudah Perubahan
				Sebelum	Sesudah				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					Rp 5.235.162.127	Rp 9.874.089.236	APBD II	Rp 1.994.537.692	Rp 998.612.949	Rp 6.231.086.870
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 4.731.287.399	Rp 6.294.533.236	APBD II	Rp 1.114.955.550	Rp 949.792.949	Rp 4.896.450.000
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp73.450.000	Rp148.720.000	APBD II	Rp14.200.000	Rp-	Rp87.650.000
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	4 laporan	4 Laporan	Rp73.450.000	Rp98.720.000	APBD II	Rp14.200.000	Rp-	Rp87.650.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Tenaga Kerja			Rp3.786.324.565	Rp3.059.773.000	APBD II	Rp-	Rp947.992.949	Rp2.838.331.616
2.07.01.2.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	20 Orang	Rp3.655.764.565	Rp2.934.773.000	APBD II	Rp-	Rp947.992.949	Rp2.707.771.616
2.07.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Dokumen	Rp130.560.000	Rp125.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp130.560.000
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 Bulan		Rp20.400.000	Rp272.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp20.400.000
2.07.01.2.05.02.5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja	51 stel	51 Paket	Rp20.400.000	Rp122.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp20.400.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp462.532.834	Rp612.281.036	APBD II	Rp58.455.550	Rp800.000	Rp520.188.384
2.07.01.2.01.6	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Paket	Rp4.596.176	Rp14.742.882	APBD II	Rp-	Rp-	Rp4.596.176

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									
2.07.01.2.0 02 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Paket	Rp73.132.772	Rp65.161.639	APBD II	Rp-	Rp-	Rp73.132.772
2.07.01.2.0 04 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	557 Paket	Rp13.590.000	Rp27.400.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp13.590.000
2.07.01.2.0 05 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	15.129 Paket	Rp13.561.136	Rp34.870.515	APBD II	Rp1.800.000	Rp-	Rp15.361.136
2.07.01.2.0 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	1.080 Dokumen	Rp4.320.000	Rp8.400.000	APBD II	Rp-	Rp800.000	Rp3.520.000
2.07.01.2.0 09 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja	312 paket	312 Laporan	Rp353.332.750	Rp453.306.000	APBD II	Rp56.655.550	Rp-	Rp409.988.300
2.07.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	46 Unit	Rp -	Rp 1.629.101.000	APBD II	Rp 1.042.300.000	Rp -	Rp 1.042.300.000
2.07.01.2.0 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	1 Unit	Rp -	Rp 471.615.000	APBD II	Rp418.800.000	Rp-	Rp418.800.000
2.07.01.2.0 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	8 Unit	Rp -	Rp 989.486.000	APBD II	Rp470.500.000	Rp-	Rp470.500.000
2.07.01.2.0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	9 Unit	Rp -	Rp 168.000.000	APBD II	Rp135.000.000	Rp-	Rp135.000.000
2.07.01.2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	0 Unit	15 Unit	Rp -	Rp -	APBD II	Rp18.000.000	Rp-	Rp18.000.000
2.07.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas Tenaga Kerja	224 Laporan	224 Laporan	Rp249.800.000	Rp252.200.000	APBD II	Rp-	Rp1.000.000	Rp248.800.000

2.07.01.2.0 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja	200 Laporan	200 Laporan	Rp2.000.000	Rp5.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp2.000.000
2.07.01.2.0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	12 Laporan	Rp91.800.000	Rp91.200.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp91.800.000
2.07.01.2.0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	12 Laporan	Rp156.000.000	Rp156.000.000	APBD II	Rp-	Rp1.000.000	Rp155.000.000
2.07.01 2.0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>30 Unit</b>	<b>31 Unit</b>	<b>Rp138.780.000</b>	<b>Rp320.458.200</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp138.780.000</b>
2.07.01 2.0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Tenaga Kerja	13 unit	13 Unit	Rp90.465.000	Rp133.898.200	APBD II	Rp-	Rp-	Rp90.465.000
2.07.01 2.0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Tenaga Kerja	1 unit	1 Unit	Rp37.435.000	Rp51.970.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp37.435.000
2.07.01 2.0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Tenaga Kerja	16 unit	16 Unit	Rp10.880.000	Rp84.590.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp10.880.000
2.07.01 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Tenaga Kerja	0	1 Unit	Rp-	Rp 50.000.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp-
2:07:03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>					<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.642.500.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp 433.180.677</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp 433.180.677</b>
2.7.3.201	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>					<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.138.500.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp 433.180.677</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 433.180.677</b>
2.7.3.201.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022	Desa Suak Labu Kec Kuala Betara, Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, Kel. Tungkal V Kec. Seberang Kota,	0	46 Orang	Rp -	Rp 1.138.500.000	APBD II	Rp317.617.201	Rp-	Rp317.617.201

			Desa Sri Agung Kec. Batang Asam								
2.7.3.201.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	13 Unit	Rp -	Rp -	APBD II	Rp115.563.476	Rp-	Rp115.563.476
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>					<b>Rp292.598.161</b>	<b>Rp1.185.000.000</b>	APBD II	<b>Rp313.356.373</b>	<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp593.954.534</b>
<b>2.07.04 2.0 1</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>	<b>350 Orang</b>	<b>350 Orang</b>	<b>Rp120.980.000</b>	<b>Rp925.000.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp282.102.964</b>	<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp391.082.964</b>
2.07.04 2.0 01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Tanjung Jabung Barat	0 Orang	0 Orang	Rp120.980.000	Rp155.000.000	APBD II		Rp12.000.000	Rp108.980.000
2.07.04 2.0 01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Tanjung Jabung Barat	350 Orang	350 Orang	Rp -	Rp -	APBD II	Rp40.000.000	Rp-	Rp40.000.000
2.7.4.201.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Desa Bukit Bakar, Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh, Desa Rantau Badak Kec. Muara Papalik	0	60 Orang	Rp -	Rp 695.000.000	APBD II	Rp242.102.964	Rp-	Rp242.102.964
2.07.04 2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal</b>	<b>1000 orang</b>	<b>1000 orang</b>	<b>Rp171.618.161</b>	<b>Rp165.000.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp31.253.409</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp202.871.570</b>
2.07.04 2.0 02 3	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal	1000 orang	1000 orang	Rp171.618.161	Rp165.000.000	APBD II	Rp 31.253.409	Rp-	Rp202.871.570
<b>2.07 05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					<b>Rp211.276.567</b>	<b>Rp543.056.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp133.045.092</b>	<b>Rp36.820.000</b>	<b>Rp307.501.659</b>
2.07 05 2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>			<b>Rp137.526.567</b>	<b>Rp238.750.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp55.603.785</b>	<b>Rp-</b>	<b>Rp193.130.352</b>
<b>2.07 05 2.0 01 1</b>	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Perusahaan	15 Perusahaan	Rp39.858.280	Rp40.000.000	APBD II	Rp23.029.625	Rp-	Rp62.887.905
<b>2.07 05 2.0 02 1</b>	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Perusahaan	15 Perusahaan	Rp34.658.287	Rp35.000.000	APBD II	Rp32.574.160	Rp-	Rp67.232.447

2.07 05 2.0 03 1	Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	perusahaan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Perusahaan/200 Orang	10 Perusahaan/200 Orang	Rp63.010.000	Rp163.750.000	APBD II	Rp-	Rp-	Rp63.010.000
2.07 05 2.0 2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Tanjung Jabung Barat</b>			<b>Rp73.750.000</b>	<b>Rp304.306.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>Rp77.441.307</b>	<b>Rp36.820.000</b>	<b>Rp114.371.307</b>
2.07 05 2.0 02 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Tanjung Jabung Barat	18 Perkara		Rp73.750.000	Rp110.800.000	APBD II	Rp-	Rp36.820.000	Rp36.930.000
2.07 05 2.0 02 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	15 SP/SB	Rp -	Rp 35.000.000	APBD II	Rp45.381.307	Rp-	Rp45.381.307
2.07 05 2.0 02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	1 LKS Tripartit	Rp-	Rp91.990.000	APBD II	Rp32.060.000	Rp	Rp32.060.000

## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan isu strategis lingkup Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan agar terwujudnya aparatur yang professional, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Serta aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agenda reformasi birokrasi pada periode pembangunan lalu yang belum dituntaskan.

Meskipun disadari bahwa dalam upaya pengurangan pengangguran dan pembinaan ketenagakerjaan bukan hal yang mudah, Para Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam mengemban amanat pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan. Diharapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi pemerintah, mampu terus berbenah diri dalam berbagai perubahan lingkungan untuk mencapai tujuannya, yaitu Terselenggara Tata Kelola Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dan Meningkatkan Produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Kuala Tungkal, 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

**DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780626 199612 1 001